

RAPAT KONSOLIDASI KANTOR OMBUDSMAN RI PERWAKILAN KALTIM BAHAS IKN

Rabu, 23 Maret 2022 - Hasti Aulia Nida

Balikpapan - Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto melakukan rapat koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur dalam rangka pembahasan tugas elemen Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur pada Rabu (23/3/2022) di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Timur.

Hery menyampaikan beberapa tugas elemen Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur yaitu terkait laporan masyarakat, membangun jaringan kerja, konsolidasi kelembagaan melalui rapat kerja nasional, survey kepatuhan pelayanan publik dan indeks persepsi maladministrasi serta kesiapan Ibu Kota Negara (IKN)

Terkait laporan masyarakat, Hery menyampaikan penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian laporan Ombudsman RI Kalimantan Timur diharapkan di tahun ini dapat dilaksanakan secara maksimal.

Sedangkan terkait membangun jaringan kerja, Hery mengatakan dapat dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan kerja sama melalui MoU atau perjanjian kerja sama bersama pemerintah daerah, dan beberapa perguruan tinggi sehingga mempermudah dan mempercepat penyelesaian laporan masyarakat.

"Dengan adanya koordinasi dan kerja sama maka akan meningkatkan responsibilitas dan konsolidasi dengan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dalam penyelesaian laporan masyarakat," tutur Hery.

Terkait konsolidasi kelembagaan melalui rapat kerja nasional atau rapat koordinasi nasional dapat terlaksana sehingga dapat memperteguh, serta memperkuat hubungan Ombudsman dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Jika kerja sama serta koordinasinya baik maka respons penyelesaian masalah akan baik," ujar Hery.

Hery juga menyampaikan bahwa konsolidasi bersama kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah dapat mempermudah penyelenggara pelayanan publik dalam meningkatkan pelayanan sehingga dapat memperbaiki Survei Kepatuhan Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Maladministrasi. Selain itu, Hery juga menyampaikan terkait kesiapan IKN, Ombudsman RI harus ikut serta dalam pengawasan persiapan infrastruktur pelayanan publik.